

ANALISIS KESIAPAN *E-GOVERNMENT* DALAM MEWUJUDKAN *SMART GOVERNANCE* DI KOTA BENGKULU

Muhammad Rezza Mauludi

NPP.31.0281

Asdaf Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu

Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan

Email: rezamauludi8@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Agung Nurrahman, S.STP., M.PA.

ABSTRACT

Background/Problem: The low utilization index of SPBE (Electronic City Administration System) in Bengkulu City, inaccessible service websites, and the absence of smart city policies in Bengkulu City are the issues underlying this research. **Objective:** This research aims to determine the readiness of e-government in realizing smart governance in Bengkulu City. **Method:** The method used is Quasi Qualitative. This method is chosen because the research results are based on theory as the foundation of thought from the beginning of the research or as an analysis tool in the field. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques involve data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Purposive sampling is used for interview sampling. **Findings Research:** The research results indicate that the readiness of e-government in Bengkulu City is adequate for implementation, with six important dimensions whose indicators have been achieved to support its implementation. Despite the readiness and adequacy of e-government, the implementation of smart governance has not been optimal due to insufficient participation from involved parties, suboptimal infrastructure, and the absence of policies. **Conclusion:** E-government in Bengkulu City can be considered well-implemented by the city government, thereby supporting the realization of smart governance implementation in Bengkulu City. Anda.

Keywords: Analysis, Readiness, E-Government, Smart Governance.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang: Indeks penggunaan SPBE Kota Bengkulu yang masih kurang, terdapat *website* pelayanan yang tidak dapat diakses, dan belum adanya kebijakan terkait *smart city* di Kota Bengkulu merupakan permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesiapan *e-government* dalam mewujudkan *smart governance* di Kota Bengkulu. **Metode:** Metode yang digunakan ialah *Quasi Qualitative*. Alasan digunakan metode tersebut ialah karena hasil penelitian yang diperoleh menggunakan teori sebagai dasar pemikiran dari awal penelitian atau alat analisis di lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data yang selanjutnya dapat ditarik kesimpulan. Teknik pengambilan sampel wawancara menggunakan purposive sampling. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan kesiapan *e-government* di Kota Bengkulu telah memadai untuk diterapkan, dengan enam dimensi penting yang indikatornya telah tercapai untuk mendukung

penerapannya. Meskipun *e-government* telah siap dan memadai, implementasi *smart governance* penerapannya belum optimal, karena kurangnya partisipasi dari pihak yang ikut berpartisipasi, infrastruktur yang belum maksimal, dan kebijakan yang belum tersedia. **Kesimpulan:** *E-government* di Kota Bengkulu dapat dikatakan telah diterapkan dengan baik oleh pemerintah Kota Bengkulu sehingga dapat mendukung dalam mewujudkan implementasi *smart governance* di Kota Bengkulu.

Kata Kunci: Analisis, Kesiapan, *E-Government*, *Smart Governance*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Adanya Penerapan *E-Government* merupakan salah satu aspek yang terkait dengan upaya yang sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam kerangka program untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih efisien melalui pemanfaatan yang lebih canggih dari Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel yang mana program ini dikenal sebagai konsep *Smart City* atau kota pintar dalam konteks pemerintah Indonesia. *Smart city* adalah sebuah kota yang menggunakan *Information and Communication of Technology* (ICT) secara pintar dan efisien dalam menggunakan berbagai sumber daya, menghasilkan penghematan biaya dan energi, meningkatkan pelayanan dan kualitas hidup, serta mengurangi jejak lingkungan, semuanya mendukung ke dalam inovasi dan ekonomi ramah lingkungan (Boyd, 2015). Konsep *smart city* sendiri terdiri dari 6 komponen yang mana salah satunya ialah *smart governance*. *Smart governance* adalah suatu konsep yang dicanangkan oleh pemerintah pusat sebagai langkah inovatif untuk menggunakan teknologi informasi dalam mengatasi permasalahan yang ada di tengah masyarakat, serta untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan komunitas lokal. *Smart governance* telah muncul sebagai cara baru dalam pelayanan publik dengan lebih efektif dan efisien, yang mana mengacu pada penggunaan teknologi informasi, data, dan inovasi dalam pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pelayanan publik. Ini bertujuan untuk mengintegrasikan teknologi dan data untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan, memberikan pelayanan yang lebih baik, dan meningkatkan keterbukaan pemerintah (Sadjati, 2017).

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapat beberapa alasan layaknya riset ini untuk dilakukan yaitu yang pertama, masih rendahnya indeks penggunaan SPBE di Kota Bengkulu dalam tiga tahun terakhir dimana menurut data hasil pemantauan SPBE tahun 2020 dan tahun 2021 indeks SPBE Pemerintah Kota Bengkulu mendapatkan predikat kurang. Selanjutnya, menurut data terbaru hasil pemantauan SPBE tahun 2022 pada Provinsi Bengkulu menunjukkan bahwa indeks penggunaan SPBE Kota Bengkulu masih tertinggal dari Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Bengkulu Tengah. Kedua, masih terdapat aplikasi atau *website* pelayanan publik pemerintah yang tidak dapat diakses. Dimana, *website* yang mengalami kerusakan adalah *website* <https://sibabe.bengkulukota.go.id/> yang merupakan portal resmi untuk layanan perpajakan Kota Bengkulu. Dan yang ketiga, belum adanya regulasi atau peraturan yang mengatur terkait penerapan *smart city* di Kota Bengkulu. Hal itulah yang menjadi salah satu masalah yang ada di Kota Bengkulu, yang mana kota tersebut masih belum memiliki regulasi yang jelas terkait *smart city*, karena kota tersebut masih berada pada tahap perencanaan dan pengembangan dalam menerapkan *smart city* dimana pemerintah kota baru melakukan bimbingan teknis tahap IV untuk menjadikan Kota Bengkulu menjadi kota cerdas.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang berkaitan dan terikat dengan penelitian penulis. Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian yang telah dilakukan. Penelitian pertama yaitu oleh (Damanik & Purwaningsih, 2018), yang berjudul Kesiapan *E-Government* Pemerintah Daerah Menuju Pengembangan *Smart Province* (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara), menemukan bahwa Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal telah menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam proses kerja pemerintahan, tetapi belum mencapai tingkat optimal, dari segi infrastruktur, sumber daya manusia, dan tata kelola. Penelitian kedua yaitu oleh (Nugraha, 2020) yang berjudul Implementasi Kebijakan *E-Government* dalam Mewujudkan *Smart Governance* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintahan Kota Bandung, menemukan bahwa pertama, kondisi lingkungan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung sudah baik, tetapi pengelolaan *E-Government* dalam menciptakan *Smart Governance* dalam tahap pelaksanaan masih lemah dari segi pengawasan. Kedua, sarana belum memadai untuk implementasi *E-Government*. Ketiga, pola hubungan antarunit kerja dan norma-norma yang berlaku perlu ditingkatkan dalam pelaksanaannya. Keempat implementasi kebijakan *E-Government* dalam mewujudkan *Smart Governance* sudah berjalan, tetapi belum menyentuh seluruh aspek pencapaian keberhasilan. Penelitian ketiga, yaitu oleh (Mandagi, 2020) yang berjudul *Leadership and Crisis Implementation of Smart governance in Realizing Tomohon Smart city*, menemukan bahwa penerapan *smart governance* di Kota Tomohon belum mencapai tingkat optimal, dan diperlukan perbaikan terutama dalam hal sumber daya manusia serta perlu meningkatkan upaya sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian penelitian selanjutnya menemukan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten dikatakan cukup siap dalam mewujudkan Klaten smart city. Hal ini dinilai menggunakan teori *e-readiness* Mutula dan Brakel yang terdiri dari 5 indikator yaitu *enterprise readiness*, *human resource readiness*, *information readiness*, *ICT readiness*, dan *external environment readiness*. Namun masih terdapat beberapa hambatan agar konsep smart city dapat terwujud dengan maksimal, maka dari itu Dinas Komunikasi dan Informatika diharapkan untuk terus meningkatkan kinerjanya agar tujuan dapat tercapai (Tamma & Utomo, 2021). Kemudian penelitian oleh (Chiqmah & Choiriyah, 2022) mengemukakan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor pendukung dalam penerapan E-Kinerja di Badan Kepegawaian Kabupaten Sidoarjo adalah: (1) infrastruktur telekomunikasi yang memadai karena dilengkapi dengan aplikasi e-kinerja yang dapat diakses melalui ponsel pribadi masing-masing pegawai negeri sipil. (2) ketersediaan dana dan anggaran untuk pelaksanaan aplikasi e-kinerja yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo. (3) instrumen hukum tertulis mengenai penerapan e-kinerja. Kemudian penelitian selanjutnya menemukan bahwa kombinasi antara keduanya yaitu penyandian kunci dengan algoritma genetika dan enkripsi kriptografi Hill Chiper merupakan kombinasi metode yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan optimasi dan penyandian kunci dimana Hill Chiper merupakan kriptografi klasik yang sangat kuat dari segi keamanannya dan algoritma genetika dengan cara kerjanya yang berdasarkan proses seleksi, warisan, dan crossover serta mutase yang kompleks sehingga menghasilkan sekuritas data informasi yang sulit dipecahkan oleh seorang kriptanalis (Nahwi, 2019). Penelitian oleh (Gusni, 2021) mengemukakan bahwa Hasil dari penelitian ini menunjukkan level kapabilitas tata kelola di RS Bhayangkara Sespima Polri Jakarta ini berada ditingkat 3 (Defined), permasalahan utama terdapat pada proses pengelolaan layanan keamanan (DSS05) serta selisih gap analysis dari semua proses adalah 1 tingkat di bawah dari tingkat yang diharapkan. Kemudian penelitian oleh (Amalia, 2021)

menghasilkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan evaluasi maturitas SPBE dalam pelayanan publik di Kecamatan memperoleh kategori “Kurang” dengan rata-rata nilai indeks dibawah 2. Oleh karena itu, perlu diberikan rekomendasi dan strategi perbaikan untuk meningkatkan nilai indeks SPBE. Kemudian penelitian selanjutnya oleh (Tamma & Utomo, 2021) Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten dikatakan cukup siap dalam mewujudkan Klaten smart city. Hal ini dinilai menggunakan teori e-readiness Mutula dan Brakel yang terdiri dari 5 indikator yaitu enterprise readiness, human resource readiness, information readiness, ICT readiness, dan external environment readiness. Namun masih terdapat beberapa hambatan agar konsep smart city dapat terwujud dengan maksimal, maka dari itu Dinas Komunikasi dan Informatika diharapkan untuk terus meningkatkan kinerjanya agar tujuan dapat tercapai. Kemudian penelitian oleh (Medina Maharani, 2021) menemukan bahwa Hasil penelitian berbagai bentuk inovasi terkait e-government sebagai langkah mewujudkan smart government oleh Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang yang bekerjasama dengan berbagai OPD terkait. Namun, pada pelaksanaannya masih terdapat kendala atau hambatan terkait dengan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi berupa server yang terkadang bermasalah, hal ini merupakan bagian dari elemen capacity. Pemerintah Kota Padang Panjang untuk kedepannya perlu meningkatkan kualitas pengadaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi terutama berkaitan dengan server.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian ini tentu berbeda dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan, dimana konteks penelitian oleh penulis yaitu dengan menambahkan dimensi kesiapan *e-government* dalam mewujudkan *smart governance* di Kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan juga berbeda dengan penelitian terdahulu oleh Budi Nugraha (2020) yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya juga terletak pada teori yang digunakan dimana penelitian ini menggunakan teori (Indrajit, 2005) yang menyatakan bahwa kesiapan *e-government* dapat diukur dari enam dimensi yaitu Infrastruktur Telekomunikasi, Tingkat konektivitas dan penggunaan TI oleh Pemerintah, Kesiapan SDM di pemerintah, Ketersediaan anggaran, Perangkat hukum, dan Perubahan paradigma, juga terdapat perbedaan pada lokus atau lokasi penelitian ini yang tentu berbeda dengan penelitian terdahulu.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai bagaimana kesiapan pelaksanaan *e-government* dalam mewujudkan *smart governance* di Kota Bengkulu.

II. METODE

Ruang lingkup penelitian yang akan dikembangkan oleh penulis relevan dengan bidang studi keilmuan Prodi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan. Penelitian ini menggunakan *Quasi-Qualitative* dimana data hasil penelitian yang diperoleh menggunakan teori sebagai dasar pemikiran dari awal penelitian atau alat analisis di lapangan. Menurut (Burhan Bungin, 2020) menjelaskan bahwa pilihan terkait metode penelitian yang diterapkan adalah hasil dari paradigma yang dipilih oleh peneliti, dimana desain kuasi kualitatif berangkat dari paradigma postpositivisme, yang berarti kebenaran objektif harus melalui verifikasi atau dibuktikan secara indrawi. Selanjutnya, postpositivisme menolak penggunaan satu teknik dalam pengumpulan data, melainkan bermacam-macam metode melalui triangulasi yang meliputi metode, sumber data, peneliti dan teori. Peneliti

mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, peneliti melakukan wawancara secara mendalam terhadap 11 orang informan yang terdiri dari Sekretaris Diskominfo Kota Bengkulu, Kepala Sub Bagian Analisis Keuangan Pusat/Daerah Diskominfo, Kepala Bidang Penyelenggaraan *E-Government* Diskominfo, Kepala Bidang Hubungan Media dan TIK Diskominfo, Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian, dan Pengembangan Kota Bengkulu, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, dan lima orang masyarakat, dimana tiga diantaranya pernah menggunakan layanan *e-government* pemerintahan. Adapun analisisnya menggunakan teori kesiapan *e-government* yang digagas oleh (Indrajit, 2005) yang menyatakan bahwa kesiapan *e-government* dapat diukur dari enam dimensi yaitu Infrastruktur Telekomunikasi, Tingkat konektivitas dan penggunaan TI oleh Pemerintah, Kesiapan SDM di pemerintah, Ketersediaan anggaran, Perangkat hukum, dan Perubahan paradigma.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesiapan implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau *ICT readiness* merujuk kepada kemampuan sebuah organisasi dalam membangun dan mengadopsi TIK. Dalam konteks *e-government*, kesiapan pelaksanaan *e-government* menunjukkan kemampuan lembaga pemerintah dalam menggunakan TIK untuk mengubah layanan publik yang awalnya bersifat konvensional menjadi layanan publik berbasis teknologi.

Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam teori kesiapan *e-government* dari Indrajit terdapat enam dimensi yang mempengaruhi kesiapan *e-government*. Enam dimensi tersebut antara lain Infrastruktur Telekomunikasi, Tingkat konektivitas dan penggunaan TI oleh Pemerintah, Kesiapan SDM di pemerintah, Ketersediaan anggaran, Perangkat hukum, dan Perubahan paradigma. Berikut adalah kesimpulan dari peneliti terkait kesiapan *e-government* di Kota Bengkulu menggunakan teori Indrajit :

3.1 Infrastruktur Telekomunikasi

a. Komputer

Komputer memiliki peran penting dalam *e-government*, sebagai alat yang digunakan untuk mengubah mindset dan mengintegrasikan pemanfaatan *Information Communication and Technology* (ICT) dalam proses bisnis pemerintah. Komputer memungkinkan pemerintah untuk mengimplementasikan sistem otomatis dan jaringan internet, seperti intranet dan internet, yang membantu mengubah proses transaksi bisnis antara publik dan pemerintah.

Tabel 1
Keadaan Sarana dan Prasarana Personal Komputer Lainnya

No	Barang Personal Komputer Lainnya	Jumlah	Keadaan	Tahun
1	PC	2	Baik	2016
2	Notebook	1	Baik	2016
3	PC	15	Baik	2017
4	Laptop	5	Baik	2017
5	PC	4	Baik	2018
6	Laptop	4	Baik	2018
7	PC	8	Baik	2019
8	Laptop	5	Baik	2019

No	Barang Personal Komputer Lainnya	Jumlah	Keadaan	Tahun
9	Note Book	1	Baik	2019
10	PC Lenovo	2	Baik	2021
11	Laptop	7	Baik	2021

Sumber : LAKIP Dinas Kominfo Kota Bengkulu Tahun 2023

Berdasarkan tabel 1 diatas, kondisi komputer di Dinas Kominfo Kota Bengkulu saat ini telah memadai untuk mendukung penyelenggaraan layanan *e-government*. Dimana Kualitas komputer yang digunakan telah memiliki spesifikasi yang baik dan fitur terbaru yang mendukung berbagai kegiatan, mulai dari pembuatan aplikasi hingga tugas sehari-hari pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, jumlahnya juga dinilai cukup dimana terdapat 55 komputer dengan kondisi yang baik dan memungkinkan setiap pegawai yang langsung dengan proses penerapan *e-government* telah memiliki komputer dinas masing-masing. Meskipun demikian, kesadaran akan perkembangan teknologi yang terus berlangsung mendorong dinas untuk tetap melakukan upgrade pada komputer sesuai dengan kebutuhan dinas. Hal ini menegaskan komitmen dinas untuk tetap relevan dan efisien dalam menyelenggarakan layanan *e-government* di tengah dinamika teknologi yang terus berkembang.

b. Jaringan

Jaringan untuk kesiapan *e-government* adalah sebuah konsep yang mengacu pada penggunaan internet untuk memperlancar proses komunikasi dan transaksi antara masyarakat, organisasi bisnis, dan lembaga pemerintah seperti melalui situs web, layanan online, dan aplikasi *e-government*. Pengembangan *e-government* melalui internet juga dapat mengoptimalkan sistem manajemen informasi dan proses pelayanan publik (Sitokdana, 2015).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang *E-Government* Dinas Komunikasi Informasi Kota Bengkulu mengatakan bahwa, kondisi dinas dan ketersediaan jaringan pada Dinas Kominfo telah mendukung kegiatan layanan *e-government*. Mereka telah berhasil mengimplementasikan jaringan komunikasi seperti LAN dan *Wi-Fi* dengan baik dan stabil, yang memberikan akses internet yang diperlukan. Selain itu, komitmen mereka terhadap pemantauan, pembaruan, dan perbaikan jaringan secara terus-menerus menunjukkan kesungguhan dalam menjaga ketersediaan dan keandalan infrastruktur mereka.

c. Infrastruktur

Infrastruktur untuk kesiapan *e-government* adalah sekumpulan teknologi dan sistem yang diperlukan untuk menunjang *e-government*. Infrastruktur ini meliputi berbagai hal, seperti sistem informasi, teknologi komunikasi, jaringan internet, dan aplikasi yang digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam layanan publik.

Gambar 1

Ruangan Call Center Dinas Kominfo Kota Bengkulu



Sumber : Dokumentasi Peneliti

Dinas Kominfo Kota Bengkulu telah membuat kemajuan signifikan dalam mengembangkan infrastruktur *e-government*. Infrastruktur komputer dan jaringan komunikasi mereka telah dikonsolidasikan dengan baik, langkah-langkah keamanan informasi yang diperkuat, dan dengan sumber daya manusia yang memungkinkan. Meskipun masih ada upaya untuk terus meningkatkan infrastruktur, Dinas Kominfo Kota Bengkulu yakin bahwa mereka memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan *e-government* di wilayah mereka.

3.2 Tingkat Konektivitas dan Penggunaan TI oleh Pemerintah

a. Pelayanan

Pelayanan pemerintah terhadap tingkat konektivitas dan penggunaan teknologi informasi (TI) untuk Penyelenggaraan pelayanan pemerintah melalui *e-government* menggunakan Teknologi Informasi (TI) telah membawa perubahan yang besar dalam cara pemerintah berinteraksi dengan warganya. Melalui TI, pemerintah dapat menyediakan layanan yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Gambar 2
Website Layanan Pemerintah Dinas Kominfo Kota Bengkulu



Sumber : kominfo.bengkulukota.go.id

Berdasarkan gambar 2 di atas terlihat pemerintah Dinas Komunikasi Informasi Kota Bengkulu Diskominfo telah melakukan inovasi platform *e-government* menggunakan *website* dan aplikasi dalam membantu melakukan pelayanan kepada publik, dimana terdapat

layanan seperti pembuatan email, permohonan TTE, layanan CCTV dan sebagainya.

b. Pemberdayaan

Pemberdayaan tingkat konektivitas dan penggunaan Teknologi Informasi (TI) oleh pemerintah adalah langkah krusial dalam mempersiapkan fondasi untuk *e-government* yang sukses. Pemberdayaan tingkat konektivitas dan penggunaan TI bukan hanya memperkuat infrastruktur *e-government*, tetapi juga mempersiapkan pemerintah untuk menghadapi tantangan dan peluang dalam era digital yang terus berkembang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang *E-Government* Dinas Komunikasi Informasi Kota Bengkulu mengatakan bahwa pemerintah telah melaksanakan pemberdayaan yang efektif terhadap penyelenggaraan *e-government* dengan berintegrasi dengan teknologi informasi. Pemerintah telah memanfaatkan TI sebagai sarana komunikasi internal, mendukung penyelesaian tugas-tugas harian, dan sebagai alat untuk menerapkan layanan-layanan digital seperti *website* dan aplikasi. Hal itu dibuktikan dari hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya diskominfo tahun 2023.

Tabel 2
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Diskominfo Tahun 2023

No	Sasaran Strategi	Indikator Kerja	Target	Realisasi	Keterangan
1	Meningkatnya pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi	Persentase OPD pelayanan publik dengan penilaian mandiri SPBE bernilai baik	20%	57%	Melebihi Target
2	Meningkatnya aksesibilitas serta kapasitas telekomunikasi dan internet	Persentase Jaringan internet untuk instansi Pemerintah Daerah			

Sumber : LAKIP Dinas Kominfo Kota Bengkulu Tahun 2023

Dengan demikian, pemerintah telah berhasil mengintegrasikan teknologi dalam proses pelayanan kepada masyarakat, yang merupakan indikasi bahwa pemberdayaan *e-government* telah berjalan dengan baik.

c. Pembangunan

Pembangunan *e-government* adalah suatu proses yang melibatkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam menyelenggarakan berbagai aktivitas pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Ini mencakup pembangunan infrastruktur TI yang memadai, seperti jaringan komunikasi yang handal dan sistem keamanan informasi yang kuat, untuk mendukung operasional *e-government*.

gkulu mengatakan bahwa :

Gambar 3
Aplikasi Merah Putih Kota Bengkulu



Sumber : Aplikasi Merah Putih Kota Bengkulu

Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan penerapan *e-government* di Dinas Kominfo Kota Bengkulu telah mengalami perkembangan yang signifikan. Langkah-langkah yang telah diambil, seperti peningkatan infrastruktur TI dengan memperkuat jaringan komunikasi dan menerapkan sistem keamanan informasi yang canggih, menunjukkan komitmen dalam memajukan *e-government*. Selain itu, pengembangan aplikasi dan platform *e-government* yang memudahkan akses masyarakat terhadap layanan publik juga merupakan langkah positif dalam meningkatkan efisiensi dan keterjangkauan layanan tersebut.

3.3 Kesiapan Sumber Daya Manusia di Pemerintah

a. Tingkat Keahlian

Pelayanan Tingkat keahlian kesiapan sumber daya manusia di pemerintah dalam kesiapan *e-government* merupakan faktor yang penting untuk meningkatkan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan efektif. Kesiapan sumber daya manusia di pemerintah dapat dikaitkan dengan ketersediaan kompetensi, kemahiran, dan kualifikasi yang diperlukan untuk mengembangkan sistem *e-government* (Uyelindo Kupang, 2019).

Dari hasil wawancara dari Kepala Bidang *E-government* Di Dinas Kominfo Kota Bengkulu dapat disimpulkan bahwa Dinas Kominfo Kota Bengkulu memiliki tim yang berkualitas dalam bidang Teknologi Informasi (TI). Potensi yang dimiliki oleh anggota tim tersebut menunjukkan bahwa mereka akan terus menjadi aset berharga dalam memajukan kemajuan teknologi informasi di Dinas Kominfo Kota Bengkulu.

b. Tingkat Kompetensi

Tingkat kompetensi kesiapan sumber daya manusia di pemerintah dalam penyelenggaraan *e-government* melibatkan pemahaman yang baik tentang teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta kemampuan teknis dalam mengoperasikan dan memelihara sistem *e-government*. Kesadaran tentang aspek hukum dan etika juga menjadi hal yang krusial dalam konteks *e-government*. Dengan memastikan SDM memiliki tingkat kompetensi yang memadai, pemerintah dapat meningkatkan kemampuannya dalam mengimplementasikan dan mengelola *e-government* dengan efektif dan efisien (Masyhur, 2014).

Gambar 4

Jumlah ASN Dinas Komunikasi, Informatika Kota Bengkulu Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Strata 3 (S3)	-	-	-
2	Strata 2 (S2)	7	6	13
3	Strata 1 (S1)	14	14	28
4	Diploma	-	2	2
5	SLTA	-	1	1
6	SLTP	-	-	-
Total		21	23	44

Sumber : LAKIP Dinas Kominfo Kota Bengkulu Tahun 2023

Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat kompetensi para pegawai di Dinas Kominfo Kota Bengkulu dalam penerapan *e-government* telah mengalami perkembangan yang positif. Langkah-langkah yang telah diambil, termasuk program pelatihan yang berkelanjutan, telah berhasil meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pegawai dalam menghadapi tantangan teknologi informasi yang terus berkembang.

3.4 Tingkat Ketersediaan Anggaran

a. Pemeliharaan

Dalam upaya ini, alokasi anggaran jangka panjang yang mencakup investasi dalam teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Evaluasi terus-menerus terhadap penggunaan anggaran dan kinerja proyek. Perlu juga dipertimbangkan pendanaan yang berkelanjutan dalam jangka panjang, dengan mencari sumber-sumber pendanaan yang dapat dipertahankan dari tahun ke tahun.

Tabel 3

Realisasi Keuangan Belanja Operasi dan Belanja Modal Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Bengkulu TA 2022

Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	343.100.000	255.668.784
	a. Penyediaan jasa pemeliharaan dan biaya pemeliharaan infrastruktur dinas	338.600.000	251.168.784

Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi
	b. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	4.500.000	4.500.000

Sumber : LAKIP Dinas Kominfo Kota Bengkulu Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, menggambarkan pendekatan yang cermat dan terencana dari Dinas Kominfo Kota Bengkulu dalam pemeliharaan anggaran untuk mendukung *e-government*. Mereka melakukan evaluasi yang teliti untuk mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas pengeluaran yang berkaitan dengan infrastruktur TI, pengembangan aplikasi, pelatihan staf, dan keamanan informasi. Selain itu, mereka menjalin kerjasama dengan pihak terkait untuk memanfaatkan sumber daya secara efisien dan memperoleh dukungan tambahan yang diperlukan. Melalui pendekatan yang transparan dan akuntabel, Dinas Kominfo memastikan bahwa setiap pengeluaran anggaran diarahkan untuk memberikan nilai tambah yang optimal bagi kemajuan *e-government* dan pelayanan publik di Kota Bengkulu.

b. Pengembangan

Pemerintah harus memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan tidak hanya mencakup biaya awal pengembangan *e-government*, tetapi juga kebutuhan pemeliharaan jangka panjang. Ini termasuk pembaruan perangkat lunak, peningkatan keamanan sistem, serta pelatihan dan pengembangan kembali SDM. Selama proses pengembangan anggaran, penting untuk mempertimbangkan fleksibilitas dan adaptabilitas. Teknologi dan kebutuhan *e-government* terus berkembang, oleh karena itu, anggaran harus mampu menyesuaikan dengan perubahan tersebut dan memberikan ruang bagi inovasi dan peningkatan yang berkelanjutan.

Tabel 4
Realisasi Keuangan Belanja Operasi dan Belanja Modal Dinas Komunikasi Informatika Kota Bengkulu TA 2022

Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi
Program Pengembangan informasi dan komunikasi publik	Pengembangan informasi dan komunikasi publik pemerintahan daerah kabupaten/kota :	6.725.763.850	6.127.289.166
	a. Pengembangan konten dan perencanaan media komunikasi publik	107.361.750	25.771.130
	b. Pengembangan media komunikasi publik	49.999.900	49.954.700
	c. Pelayanan informasi publik	270.161.000	53.855.550
	d. Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas	6.298.241.200	5.997.707.786

Sumber : LAKIP Dinas Kominfo Kota Bengkulu Tahun 2023

Berdasarkan tabel tersebut, menunjukkan komitmen Dinas Kominfo Kota Bengkulu dalam mengelola anggaran dengan cermat untuk mendukung implementasi *e-government*. Mereka memastikan alokasi dana yang memadai untuk berbagai aspek *e-government*, termasuk pengembangan infrastruktur TI dan pemeliharaan sistem aplikasi. Melalui proses perencanaan yang teliti, mereka menetapkan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan proyek-proyek *e-government* yang sedang berjalan serta untuk proyek-proyek baru yang direncanakan.

c. Operasional

Operasional anggaran *e-government* merupakan proses yang kompleks dan terstruktur yang melibatkan sejumlah langkah penting. Pemerintah harus merencanakan dan mengalokasikan anggaran yang mencakup berbagai aspek *e-government*, termasuk investasi dalam infrastruktur TIK, pengembangan perangkat lunak, pelatihan SDM, serta dukungan teknis. Langkah selanjutnya adalah mengelola anggaran tersebut dengan memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dan prioritas yang telah ditetapkan. Evaluasi berkala terhadap kinerja proyek-proyek *e-government* juga penting untuk memastikan penggunaan dana yang optimal.

Tabel 5
Realisasi Keuangan Belanja Operasi dan Belanja Modal Dinas Komunikasi Informatika Kota Bengkulu TA 2022

Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi
Program pengelolaan aplikasi informatika	Pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota :	835.526.540	661.815.756
	a. Pengelolaan pusat data pemerintah daerah	168.840.000	134.524.225
	b. Koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik	259.750.000	202.020.000
	c. Pemeliharaan, pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	406.936.540	369.671.531

Sumber : LAKIP Dinas Kominfo Kota Bengkulu Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan biaya operasional yang terkait dengan penerapan *e-government* di Dinas Kominfo Kota Bengkulu mencakup sejumlah aspek penting, seperti pemeliharaan infrastruktur TI, lisensi perangkat lunak, serta dukungan teknis bagi pengguna layanan *e-government*. Semua biaya ini dikelola dengan cermat untuk memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan optimal, serta untuk menjaga kelancaran dan kualitas layanan *e-government* yang disediakan kepada masyarakat Kota Bengkulu.

3.5 Perangkat Hukum

a. Peraturan Presiden

Peraturan Presiden adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau konstitusi. digunakan untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan, pelaksanaan kebijakan publik, dan hal-hal terkait lainnya yang tidak memerlukan pengesahan dari DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Dalam terselenggaranya *e-government*, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden no 95 tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang didalamnya termuat terkait tata kelola, manajemen SPBE, layanan SPBE, layanan induk dan sebagainya.

b. Instruksi Presiden

Instruksi Presiden (Inpres) terkait dengan penerapan *e-government* adalah perintah resmi yang dikeluarkan oleh Presiden kepada instansi-instansi terkait pemerintah untuk melakukan tindakan tertentu dalam rangka mendorong, mengarahkan, atau mengatur implementasi *e-government*. Instruksi Presiden no 3 tahun 2003 merupakan Instruksi Presiden yang mengatur Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government* yang didalamnya berisi tentang motivasi kebijakan ini dibuat, tujuan pengembangan *e-government*, kesiapan memanfaatkan TI dan sebagainya.

c. Peraturan Walikota

Peraturan walikota terkait kesiapan *e-government* merupakan peraturan yang digunakan sebagai acuan untuk merancang, membangun, dan mengimplementasikan sistem *e-government* bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien. Walikota Bengkulu mengeluarkan peraturan walikota no 15 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu yang dibuat dengan tujuan sebagai acuan dan memberikan landasan hukum bagi implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu. Dalam rangka implementasi sistem ini, setiap instansi pemerintah Kota Bengkulu diwajibkan untuk mengembangkan dan mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses administrasi dan layanan publik.

3.6 Perubahan Paradigma

a. Cara Berpikir

Dalam mempersiapkan *e-government*, penting untuk memahami dengan jelas kebutuhan dan tujuan dari implementasi *e-government*, serta menganalisis lingkungan yang akan mempengaruhinya. Identifikasi tantangan yang mungkin dihadapi, seperti keterbatasan anggaran atau resistensi organisasional, juga menjadi langkah kunci dalam mempersiapkan kesiapan *e-government*. Berpikir tentang strategi pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi, serta cara mengelola perubahan budaya organisasi yang dibutuhkan, merupakan hal penting dalam menyusun rencana implementasi.

Penerapan *e-government* terhadap mindset dan perilaku pimpinan serta karyawan di Kota Bengkulu. Terjadi perubahan paradigma di mana mereka lebih menyadari pentingnya penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik. *E-government* juga telah menciptakan budaya kerja yang lebih kolaboratif dan inovatif di antara mereka. Secara keseluruhan, terdapat perubahan positif dalam cara berpikir dan bertindak dari pimpinan maupun karyawan, yang mengarah pada peningkatan kinerja dan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.

b. Cara Kerja

Dalam kesiapan *e-government*, cara kerja yang diambil mencakup serangkaian proses yang terorganisir dan terarah. Penyusunan rencana strategis menjadi landasan utama, dimana visi, misi, dan tujuan *e-government* ditetapkan. Analisis kebutuhan menyusul, yang melibatkan identifikasi layanan yang akan disediakan dan infrastruktur yang dibutuhkan.

Penerapan *e-government* di Kota Bengkulu telah menghasilkan perubahan signifikan dalam cara kerja Dinas Kominfo. Salah satu perubahan utama adalah terciptanya proses kerja yang lebih efisien dan terstruktur berkat penggunaan sistem informasi berbasis elektronik. Hal ini telah mempermudah penyelenggaraan layanan publik dan meningkatkan responsivitas Dinas terhadap kebutuhan masyarakat melalui layanan yang lebih mudah diakses melalui platform online. Secara keseluruhan, perubahan ini telah membawa dampak positif dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat Kota Bengkulu.

c. Bersikap

Bersikap adalah respons atau tindakan yang diambil seseorang dalam menghadapi perubahan terkait adanya kebijakan *penerapan e-government*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang *E-Government* Dinas Komunikasi Informasi Kota Bengkulu mengatakan bahwa sikap pimpinan dan karyawan terhadap penerapan *e-government* di Kota Bengkulu sangat positif secara keseluruhan. Dimana pimpinan dan karyawan menunjukkan sikap terbuka dan progresif dalam menghadapi perubahan ini. Meskipun awalnya mungkin terdapat beberapa kekhawatiran atau ketidakpastian terkait dengan perubahan tersebut. Mereka melihat potensi besar dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas, menyederhanakan proses kerja, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

d. Berprilaku

Perilaku pegawai merupakan mengacu kepada komitmen yang tinggi terhadap tugas dan tanggung jawab mereka dalam mengembangkan dan mengelola infrastruktur *e-government*. Hal ini mencakup disiplin dalam menjalankan tugas-tugas sehari-hari serta kesediaan untuk bekerja keras demi mencapai tujuan organisasi terkait *e-government*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang *E-government* Dinas Komunikasi Informasi Kota Bengkulu mengatakan bahwa terlihat bahwa penerapan *e-government* di Kota Bengkulu telah membawa perubahan positif dalam perilaku pegawai terhadap masyarakat. Mereka menjadi lebih responsif dan proaktif dalam melayani kebutuhan masyarakat melalui platform *e-government* yang telah disediakan. Pegawai aktif memberikan bantuan dan dukungan teknis kepada masyarakat yang memerlukan bantuan dalam menggunakan layanan-layanan elektronik tersebut. Selain itu, penerapan *e-government* juga telah mendorong pegawai untuk menjadi lebih transparan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

e. Kebiasaan Sehari-hari

Kebiasaan sehari-hari pegawai merupakan rangkaian kegiatan yang menjadi rutinitas dari karyawan saat bekerja di dinas kominfo kota Bengkulu yang mencakup cara bekerja, cara

berinteraksi, cara melayani dan sebagainya.

Penerapan *e-government* di Kota Bengkulu telah menghasilkan perubahan yang signifikan dalam kebiasaan sehari-hari pimpinan dan karyawan di lingkungan Dinas Kominfo. Mereka telah mengadopsi penggunaan teknologi informasi secara lebih aktif dalam menjalankan tugas-tugas rutin mereka melalui aplikasi dan platform *e-government*.

3.7 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang pesat. Perkembangan inilah yang melatarbelakangi pemerintah menerapkan *E-Government* dalam optimalisasi pelayanan publik. Oleh sebab itu, *E-Government* merupakan kunci dan peran utama untuk membangun dan mewujudkan *smart governance*. Seperti halnya temuan (Mandagi, 2020) menyatakan bahwa *e-government* merupakan basis dalam *smart governance*, dimana pelayanan publik tidak hanya menggunakan media elektronik saja tapi pelayanan tersebut terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informatika dan komunikasi (TIK) sehingga menghasilkan pelayanan yang cepat dan efisien sesuai dengan tuntutan era disrupsi.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bengkulu memegang peran krusial dalam penerapan *e-government* dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun, evaluasi menunjukkan bahwa peran ini masih belum berjalan sepenuhnya. Sama halnya dengan temuan penelitian Budi Nugraha bahwa beberapa faktor penghambat seperti infrastruktur termasuk fasilitas sarana dan prasarana yang tidak memadai masih menjadi kendala utama. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan tata kelola penerapan *e-government* masih belum berjalan efektif (Nugraha, 2020). Oleh karena itu, Diskominfo perlu memperbaiki dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai, serta memperkuat kerjasama dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk memastikan pengembangan *e-government* dapat terlaksana dengan baik.

IV. KESIMPULAN

Mendasar pada penelitian yang telah dilakukan terkait kesiapan *e-government* oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu untuk mewujudkan *smart governance* di Kota Bengkulu, dapat diambil kesimpulan bahwasannya melalui dimensi teori yang digunakan yaitu Infrastruktur Telekomunikasi, Tingkat Konektivitas dan Penggunaan TI oleh Pemerintah, Kesiapan SDM di Pemerintah, Tingkat Ketersediaan Anggaran, Perangkat Hukum, dan Perubahan Paradigma, sudah berjalan cukup baik tapi masih bisa dikatakan optimal. Pemerintah Kota Bengkulu sendiri dalam pelaksanaan *e-government* sudah berupaya dengan cukup baik, termasuk inovasi dan ketaifitas dalam pelaksanaan program kerja. Namun, masih terdapat indikiator dalam dimensi tersebut yang masih belum terpenuhi, yaitu infrastruktur yang masih kurang.

Keterbatasan Penelitian, keterbatasan waktu menjadi hambatan dalam penelitian ini untuk kepentingan identifikasi permasalahan secara lebih mendalam dan juga keterbatasan sumber referensi dan pengetahuan dalam mendukung analisis secara menyeluruh. Adanya keterbatasan ini mungkin mempengaruhi kelengkapan dan kejelasan penelitian, sehingga dapat membatasi penjelasan, deskripsi, dan kesimpulan yang dihasilkan. Oleh karena itu, untuk penelitian mendatang, disarankan untuk memperluas cakupan literatur dan *range* waktu yang lebih banyak untuk analisis yang lebih mendalam demi meningkatkan keabsahan dan validitas hasil penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*), Penulis menemukan bahwa penelitian ini

masih bisa dikembangkan dan diperlengkap dengan menambahkan dimensi pada teori-teori lainnya. Penulis juga menyadari perlunya penelitian lanjutan di lokasi serupa terkait Analisis Kesiapan *E-Government* Dalam Mewujudkan *Smart Governance* di Kota Bengkulu. Rekomendasi ini berdasarkan adanya inovasi pembentukan *Smart City* pada tahun 2024 yang berkaitan dengan pelaksanaan *e-government* pada pemerintah di Kota Bengkulu. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengalokasikan lebih banyak waktu untuk pengumpulan data yang aktual dan analisis yang lebih mendalam. Selain itu, perlu dilakukan upaya lanjutan dalam mencari sumber referensi yang akurat dan selinier dengan topik penelitian ini untuk memperkuat landasan teoritis dan metodologi penelitian yang dipergunakan. Nantinya diharapkan hasil penelitian lanjutan akan memberikan gambaran dan kontribusi yang lebih jelas dan lugas dalam upaya pengembangan dan peningkatan *e-government* di kota Bengkulu.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih penulis tujukan kepada Pemerintah Kota Bengkulu terkhusus Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu beserta seluruh jajaran, yang telah memberikan waktu, tempat, dan kesempatan bagi penulis selama pelaksanaan penelitian. Ucapan terimakasih juga ditujukan kepada Bapak Agung Nurrahman, S.STP, M.PA. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia memberikan arahan dan bimbingan, waktu, tenaga, dan pikirannya kepada penulis terkait penyelesaian tugas akhir skripsi ini.



VI. Daftar Pustaka

- Amalia, E. (2021). Model Kematangan e-Government Berdasarkan SPBE Menpan Tahun 2018. *JUMANJI (Jurnal Masyarakat Informatika Unjani)*, 5(1), 52. <https://doi.org/10.26874/jumanji.v5i1.92>
- Boyd, C. (2015). The Smartest Cities In The World 2015: Methodology. *Fast Company & Inc.* <https://www.fastcompany.com/3038818/the-smartest-cities-in-the-world-2015-methodology>
- Burhan Bungin. (2020). *Social Research Methods* (Edisi Ketu). KENCANA.
- Chiqmah, Z., & Choiriyah, I. U. (2022). Supporting Factors in the Implementation of Smart Governance through E-Performance of the Regional Civil Service Agency of Sidoarjo Regency. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 7(1), 14–19. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v7i1.1700>
- Damanik, M. P., & Purwaningsih, E. H. (2018). Kesiapan E-Government Pemerintah Daerah Menuju Pengembangan Smart Province (Studi Pada Pemerintah Kabutaen Mandailing Natal , Provinsi Sumatra Utara) E-Goverment Readiness On Local Government Towards Development Of Smart Province (Studi On Mandailin. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 22, 185–196.
- Gusni, R. S. A., Kraugusteeliana, K., & Pradnyana, I. W. W. (2021). Analisis Tata Kelola Keamanan Sistem Informasi Rumah Sakit Bhayangkara Sespima Polri Jakarta Menggunakan COBIT 2019. *Konferensi Nasional Ilmu Komputer (KONIK) 2021, September*, 434–439.
- Indrajit, R. E., Zainudin, A., & Rudianto, D. (2005). Electronic government in action. *Yogyakarta: Andi Yogyakarta*, 1–272. <https://www.academia.edu/download/50613264/Preinexus-TeknikSearchingEfektifDuniaPendidikan.pdf>
- Mandagi, M. M., Mantiri, J., & Kairupan, S. B. (2020). Sub-Theme : Leadership and Crisis Implementation of Smart Governance in Realizing Tomohon Smart City. *Proceedings IAPA Annual Conference*, 437–448.
- Masyhur, F. (2014). Kesiapan E-Skills Pemerintah Daerah dalam Implementasi E-Government di Kawasan Mamminasata. *Jurnal Pekommas*, 17(3), 151–160.
- Medina Maharani1, F., Putera2, R. E., & Ariany3, R. (2021). Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT SEBAGAI LANGKAH MEWUJUDKAN SMART GOVERNMENT DI KOTA PADANG PANJANG. *Ranah Publik Indonesia Kontemporer*, 3(1), 1–12. <https://rapik.pubmedia.id/index.php/rapik>
- Nahwi, M. I. (2019). *Penyandian Kunci Dengan Optimasi Menggunakan Algoritma Genetika Pada Kunci Enkripsi Kriptografi Hill Cipher*. 1, 45–50.
- Nugraha, B. (2020). Implementation of E-Government Policy in Making Smart Governance at Government Communication and Informatics Department, Bandung. *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.51486/jbo.v2i1.46>
- Sadjati, I. M. (2017). *OPTIMALISASI PERAN SAINS & TEKNOLOGI UNTUK MEWUJUDKAN SMART CITY*.
- Sitokdana, M. N. N. (2015). Evaluasi Implementasi eGovernment Pada Situs Web Pemerintah Kota Surabaya, Medan, Banjarmasin, Makassar dan Jayapura. *Jurnal Buana Informatika*, 6(4), 289–300. <https://doi.org/10.24002/jbi.v6i4.461>
- Tamma, R. A., & Utomo, I. H. (2021). Kesiapan Dinas Komunikasi dan Informatika Dalam Mewujudkan Klaten Smart City. *Journal of Governance and Policy Innovation*, 1(1), 18–32. <https://doi.org/10.51577/jgpi.v1i1.66>
- Uyelindo Kupang, S. (2019). *Kesiapan Implementasi E-Government Menuju Penguatan*

Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Kupang The Readiness of Kupang City in Implementing E-Government to Strengthening The Regional Innovation System (SIDa) Yohanes Payong. IV(1), 1–19. <http://www.jurnalinovkebijakan.com/>

